



Spending Better melalui Efisiensi Anggaran Dana Provinsi Lampung Perbandingan Bulan Januari hingga Mei Tahun 2024 dan 2025

Chatarina Ovy Mayta*, Fransisca Anggraini, Jenie Jesicca Hr, Mega Metalia, Ratna Septiyanti

Universitas Lampung

Abstrak: Studi ini menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam mendorong konsep "*Spending Better*" di Provinsi Lampung, yang menuntut pergeseran menuju *Value for Money* (VfM) di tengah keterbatasan fiskal. Menggunakan desain *mixed-methods* dan analisis komparatif APBD 2024–2025, didukung metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), temuan menunjukkan Efisiensi Alokasi positif. Hal ini tercermin dari realokasi dana: pengurangan belanja operasional dan peningkatan drastis realisasi Belanja Modal (14,26% ke 38,54%). Namun, pencapaian VfM terhambat oleh tantangan Kapasitas Pelaksanaan Teknis dan risiko penurunan kualitas proyek. Kesimpulan: *Spending Better* memerlukan transformasi paradigma dari sekadar penyerapan anggaran menjadi upaya menghasilkan dampak pembangunan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Spending Better*, *Value for Money* (VfM), Efisiensi Anggaran, *Data Envelopment Analysis* (DEA), Belanja Modal

*Correspondence: Chatarina Ovy Mayta
Email: chatarinaovy05@gmail.com

Received: 27-11-2025
Accepted: 04-12-2025
Published: 31-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study analyzes the impact of budget efficiency policies in promoting the concept of "*Spending Better*" in Lampung Province, which requires a shift towards *Value for Money* (VfM) amid fiscal constraints. Using a *mixed-methods* design and comparative analysis of the 2024–2025 Regional Budget, supported by the *Data Envelopment Analysis* (DEA) method, the findings show positive Allocation Efficiency. This is reflected in the reallocation of funds: a reduction in operational spending and a drastic increase in capital expenditure realization (14.26% to 38.54%). However, the achievement of VfM is hampered by challenges in technical implementation capacity and the risk of declining project quality. Conclusion: *Spending better* requires a paradigm shift from merely absorbing the budget to efforts to produce real development impacts for the welfare of the community.

Keywords: *Spending Better*, *Value for Money* (VfM), Budget Efficiency, *Data Envelopment Analysis* (DEA), Capital Expenditure

Pendahuluan

Provinsi Lampung memegang peranan krusial sebagai "Gerbang Sumatera" yang menopang jaringan ekonomi nasional, didukung sektor utama seperti pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan (26,21% PDRB). Namun, Lampung dihadapkan pada ketidakseimbangan struktural antara kebutuhan pembangunan mendesak (infrastruktur, pendidikan, kesehatan) dan kemampuan fiskal yang terbatas. Dengan pertumbuhan ekonomi (4,57%) yang di bawah target nasional dan ketergantungan

transfer pusat mencapai 70% dari pendapatan daerah, ruang fiskal semakin tertekan oleh tuntutan belanja mendesak (hingga 25% anggaran tahunan) dan fluktuasi komoditas global. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Aziz, Adnan Abdul & Eny Kusumawati 2023 mengenai "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin rendah tingkat ketergantungan pada pusat maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan "pengeluaran lebih" tradisional menuju "*Spending Better*"— yaitu pengelolaan yang fokus pada *Value for Money* (VfM), menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, demi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kesejahteraan. Terdapat asumsi bila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan dan terjadi pemborosan jika sebaliknya. Pengukuran efisiensi diukur dengan rasio antara *input* dengan *output*, bila semakin besar *output* dibandingkan dengan *input*-nya maka semakin besar tingkat efisiensi, sehingga ukuran efisiensi mengukur biaya atas *output* atau seberapa baik organisasi pemerintahan mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output*. Sedangkan efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan (Rusdiana,2017).

Dihadapkan pada keterbatasan transfer pusat (hanya 36,03% dari APBD 2024) dan tuntutan pembangunan yang mendesak, penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan tren pengeluaran Provinsi Lampung sebelum (2024) dan setelah (2025) diterapkan kebijakan efisiensi anggaran, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Studi ini secara khusus menilai dampak "*Spending Better*" dalam mengatasi inefisiensi dan berupaya menilai apakah langkah perbaikan mampu meningkatkan tingkat penyerapan anggaran dari 85% menjadi lebih dari 95% tanpa mengurangi kualitas program. Fokus utama analisis adalah pada tahap perencanaan dan penilaian pengeluaran langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum (yang menyerap 60% anggaran) untuk mengidentifikasi titik inefisiensi struktural, seperti pemanfaatan anggaran yang terburu-buru di akhir tahun. Program-program kegiatan pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya sebuah anggaran. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, maka konsep kegesitan yang dibangun dalam penyelenggaraan pemerintah dimulai melalui proses penganggaran yang gesit pula (Adi dan Dian, 2021). Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalian potensi ekonomi daerah dan

penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan (Anwar dkk, 2015).

Secara metodologis, studi ini menerapkan desain *mixed-methods sequential explanatory*, yang mengawali dengan analisis kuantitatif data numerik dilanjutkan interpretasi kualitatif temuan. Data utama dikumpulkan menggunakan teknik sekunder berbasis *web* dari sumber resmi dan kredibel: APBD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan LHP BPK Provinsi Lampung. Metode ini menjamin keandalan data dari sumber sekunder dan efisiensi pengumpulan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai dinamika efisiensi anggaran, merumuskan rekomendasi strategis—seperti penguatan perencanaan berbasis *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan pengintegrasian prinsip VfM—untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan berfokus pada hasil akhir, serta berkontribusi pada diskusi desentralisasi fiskal di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep "*Spending Better*" telah menjadi landasan utama global dalam pengelolaan keuangan publik, menekankan bahwa pencapaian hasil optimal dari setiap pengeluaran, baik dalam *output* maupun *dampak*, adalah lebih krusial daripada sekadar kepatuhan administrasi atau fokus pada penghematan tradisional. Perubahan paradigma ini mengalihkan fokus anggaran publik dari total belanja menuju mutu serta dampak nyata yang dihasilkan, menjadi esensi dari studi "*Spending Better Melalui Efisiensi Anggaran Provinsi Lampung Perbandingan Tahun 2024 dan 2025*" yang menghendaki transformasi tata kelola keuangan wilayah. Gagasan ini berakar pada prinsip peningkatan *Value for Money* (VfM), yang memiliki tiga pilar utama: (1) Efisiensi (reduksi *input* untuk *output* tertentu), (2) Efektivitas (pencapaian sasaran optimal), dan (3) Ekonomi (perolehan *input* dengan biaya terendah tanpa mengorbankan mutu). Ketiga unsur ini harus terintegrasi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran, mengarahkan Provinsi Lampung dari pendekatan pengeluaran tradisional menuju efisiensi yang strategis dan berkelanjutan.

Kerangka hukum di Provinsi Lampung, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengadopsi prinsip nilai manfaat, kepatuhan, dan kinerja. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Penelitian terdahulu (misalnya Mardiasmo, 2018) menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada perencanaan dan penganggaran yang tidak terkoordinasi, menghasilkan alokasi yang

inefisien dan tumpang tindih program. Secara spesifik, dalam perspektif Mulyani et al. (2018) mengenai *Public Financial Management*, efisiensi anggaran bukan pemotongan tanpa dasar, melainkan upaya terencana untuk mengurangi pemborosan dan kebocoran. Data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung memperkuat temuan ini, menunjukkan inefisiensi seperti ketidakakuratan perencanaan barang/jasa, pemilihan penyedia yang tidak kompetitif, dan pengeluaran terburu-buru di akhir tahun yang mengabaikan prinsip ekonomi dan efisiensi demi penyerapan anggaran. Tinjauan ini memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk menganalisis efisiensi anggaran di Lampung.

Untuk menilai efisiensi anggaran secara kuantitatif dan objektif, penelitian ini menerapkan *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA adalah metode non-parametrik yang banyak digunakan di sektor publik (Cooper et al., 2011) untuk membandingkan kinerja unit pengelola anggaran. Dengan menggunakan alokasi anggaran dan realisasi sebagai data *input* dan *output* yang dikumpulkan dari Dokumen APBD dan LKPD, DEA memfasilitasi identifikasi unit yang efisien dan unit yang masih memiliki potensi peningkatan. Kajian literatur ini, dengan menggabungkan prinsip VfM dan analisis DEA, meletakkan dasar kuat bahwa penerapan "*spending better*" di Provinsi Lampung memerlukan transformasi tata kelola yang komprehensif—meliputi perencanaan berbasis realisasi, pengelolaan transparan, dan evaluasi pasca-pengeluaran—sehingga setiap rupiah anggaran publik mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode

Studi ini bertujuan mengevaluasi efisiensi anggaran "*Spending Better*" di Provinsi Lampung dengan mengimplementasikan metode penelitian sekunder yang mendalam, dipilih karena efisiensi, biaya rendah, dan kemampuannya menganalisis data publik historis, sejalan dengan paradigma penelitian berbasis bukti dalam analisis keuangan publik. Desain yang digunakan adalah *mixed-methods sequential explanatory* yang dimodifikasi, di mana analisis kuantitatif (perbandingan anggaran vs. realisasi) mendahului analisis kualitatif (analisis konten) untuk menjelaskan temuan, dengan fokus pada periode 2024 (*baseline*) dan 2025 (setelah efisiensi). Data sekunder diperoleh dari sumber resmi yang kredibel dan terakses publik, yaitu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari laman resmi Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKAD, serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup realisasi dan SiLPA dari *website* DJPb Kemenkeu dan BPK RI, dikumpulkan secara digital antara Januari hingga Mei 2025. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif sederhana,

mengeksplorasi selisih persentase antara anggaran dan realisasi sebagai indikator efisiensi, sementara keandalan hasil dijamin melalui triangulasi sumber dan uji sensitivitas, di mana keseluruhan pendekatan ini menawarkan *insight* yang bermakna bagi rekomendasi strategis meskipun potensi keterbatasan data diatasi melalui verifikasi silang untuk menjaga validitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Lampung dapat dianalisis dengan membandingkan APBD 2024 dan 2025, yang menjadi kunci untuk menilai efisiensi belanja. Membandingkan realisasi dengan pagu anggaran penting untuk menilai peningkatan kualitas belanja atau tercapainya *spending better*. Data realisasi Januari hingga Mei 2024 dan 2025 memberikan indikasi awal perubahan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dari kemampuan merealisasikan anggaran dengan penyerapan terbaik, sedangkan efektivitas dari pencapaian target program. Data menunjukkan perubahan persentase realisasi terkait pengetatan dan realokasi anggaran. Efisiensi mengukur rasio output terhadap *input*, atau persentase realisasi terhadap pagu. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Yuliyanto, Wakhid dkk 2022 mengenai "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020" menyatakan bahwa peningkatan efisiensi berarti mencapai *output* dengan *input* lebih rendah atau optimal. Dalam mengukur atau membandingkan antara keluaran (*output*) yang telah dihasilkan terhadap masukan (*input*) yang digunakan, efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk dipergunakan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah jenis laporan yang dibuat sebelum dibuatnya neraca serta arus kas. Pada pemerintahan, anggaran menjadi pokok yang mana menjadi sebuah dasar tercapainya kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan.

Pada 2024, realisasi Belanja Daerah mencapai 27,29% dari pagu Rp8.333,59 miliar (Januari-Mei), menunjukkan potensi ketidakefisienan. Pada 2025, realisasi 25,57% dari pagu Rp7.632,91 miliar, dengan pagu turun Rp700,68 miliar, menandai kebijakan efisiensi untuk kurangi belanja nominal. Indikator utama terlihat pada Belanja Modal, yang efisiensi penyerapannya naik dari 14,26% (2024) ke 38,54% (2025), menunjukkan percepatan proyek investasi. Dengan pagu Belanja Modal turun dari Rp1.182,96 miliar (2024) ke Rp980,20 miliar (2025), ini menandai efisiensi alokasi lebih tinggi. Efisiensi penyerapan Belanja Pegawai turun 4,09%, perlu diteliti apakah akibat keterlambatan pembayaran atau pengetatan operasional.

Efektivitas merujuk pada pencapaian hasil program terhadap target. Dengan keterbatasan data hasil, efektivitas dilihat dari pergeseran alokasi ke peningkatan kualitas pembangunan. Pagu Belanja Modal 2025 turun nominal ke Rp980,20 miliar dari Rp1.182,96 miliar (2024), tapi realisasi naik drastis. Pagu Pengeluaran Lainnya (termasuk Bagi Hasil, Hibah, Bansos) turun dari Rp2.637,72 miliar (2024) ke Rp1.838,17 miliar (2025). Penurunan ini terutama pada Bagi Hasil (dari Rp1.753,50 miliar ke Rp1.405,27 miliar) dan Hibah (dari Rp846,62 miliar ke Rp385,96 miliar), menunjukkan rasionalisasi transfer. Namun, Bansos naik dari 7,38% (2024) ke 9,27% (2025), menandai pergeseran prioritas ke program dampak cepat pada kesejahteraan, meski kualitas perlu evaluasi. Jika Belanja Modal menghasilkan hasil fisik dan sosial nyata seperti infrastruktur, peningkatan persinya di tengah penurunan Belanja Lainnya dan Pegawai menunjukkan efektivitas alokasi lebih baik untuk hasil pembangunan prioritas.

POSTUR APBD
Lampung
Tahun 2024

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Mei 2024, - data diterima SIKD per 02 Oktober 2025

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	8.342,20 M	2.555,24 M	30.63
PAD	4.936,50 M	1.492,65 M	30.24
Pajak Daerah	3.344,12 M	1.258,82 M	37.64
Retribusi Daerah	341,16 M	151,03 M	44.27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	584,82 M	52,64 M	9.00
Lain-Lain PAD yang Sah	666,40 M	30,16 M	4.53
TKDD	3.354,66 M	1.058,88 M	31.56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.354,66 M	1.058,88 M	31.56
Pendapatan Lainnya	51,04 M	3,71 M	7.27
Pendapatan Hibah	13,79 M	2,65 M	19.21
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37,25 M	1,06 M	2.85
Belanja Daerah	8.333,59 M	2.274,40 M	27.29
Belanja Pegawai	2.501,01 M	813,95 M	32.55
Belanja Pegawai	2.501,01 M	813,95 M	32.55
Belanja Barang dan Jasa	2.011,91 M	556,94 M	27.68
Belanja Barang dan Jasa	2.011,91 M	556,94 M	27.68
Belanja Modal	1.182,96 M	168,70 M	14.26
Belanja Modal	1.182,96 M	168,70 M	14.26
Belanja Lainnya	2.637,72 M	734,81 M	27.86
Belanja Bagi Hasil	1.753,50 M	563,89 M	32.16
Belanja Hibah	846,62 M	169,69 M	20.04
Belanja Bantuan Sosial	5,13 M	0,38 M	7.38
Belanja Tidak Terduga	32,47 M	0,86 M	2.63
Pembiayaan Daerah	-8,61 M	0,00 M	0.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	99,67 M	0,00 M	0.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99,67 M	0,00 M	0.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	108,28 M	0,00 M	0.00
Penyertaan Modal Daerah	108,28 M	0,00 M	0.00

Gambar 1. Data Anggaran dan Realisasi Dana Provinsi Lampung Tahun 2024

Sumber: POSTUR APBD Tahun 2024

POSTUR APBD
Lampung
Tahun 2025

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Mei 2025, - data diterima SIKD per 02 Oktober 2025

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	7.557,91 M	2.313,83 M	30.61
PAD	4.020,05 M	1.314,59 M	32.70
Pajak Daerah	2.921,14 M	1.024,47 M	35.07
Retribusi Daerah	450,12 M	143,42 M	31.86
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	316,15 M	27,35 M	8.65
Lain-Lain PAD yang Sah	332,64 M	119,36 M	35.88
TKDD	3.489,38 M	993,88 M	28.48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.489,38 M	993,88 M	28.48
Pendapatan Lainnya	48,48 M	5,36 M	11.05
Pendapatan Hibah	13,79 M	2,44 M	17.68
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,68 M	2,92 M	8.41
Belanja Daerah	7.632,91 M	1.951,80 M	25.57
Belanja Pegawai	2.916,69 M	829,95 M	28.46
Belanja Pegawai	2.916,69 M	829,95 M	28.46
Belanja Barang dan Jasa	1.897,85 M	559,43 M	29.48
Belanja Barang dan Jasa	1.897,85 M	559,43 M	29.48
Belanja Modal	980,20 M	377,73 M	38.54
Belanja Modal	980,20 M	377,73 M	38.54
Belanja Lainnya	1.838,17 M	164,70 M	10.05
Belanja Bagi Hasil	1.405,27 M	96,96 M	6.90
Belanja Bantuan Keuangan	1,00 M	10,00 M	1.000.00
Belanja Hibah	385,96 M	77,37 M	20.05
Belanja Bantuan Sosial	3,47 M	0,32 M	9.27
Belanja Tidak Terduga	42,47 M	0,05 M	0.12
Pembiayaan Daerah	0,00 M	0,00 M	0
Penerimaan Pembiayaan Daerah	75,00 M	0,00 M	0.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75,00 M	0,00 M	0.00

Gambar 2. Data Anggaran dan Realisasi Dana Provinsi Lampung Tahun 2025
Sumber: POSTUR APBD Tahun 2025

Value for Money tercapai melalui Efisiensi (membeli masukan terbaik dengan harga terendah), Ekonomis (mencapai *output* tertentu dengan masukan terendah), dan Efektivitas (mencapai hasil yang ditargetkan). Dalam Efisiensi Alokasi, ada indikasi positif: Anggaran Operasional (Pegawai dan Lainnya) dikurangi, sementara Belanja Modal ditingkatkan persentasenya, mencerminkan alih sumber daya dari konsumsi ke investasi. Namun, indikator Efisiensi dan Efektivitas hasil sulit dievaluasi hanya dari data realisasi. Misalnya, apakah peningkatan besar realisasi Pengeluaran Modal pada 2025 menghasilkan proyek berkualitas (Ekonomis & Efektivitas), atau hanya menghabiskan anggaran terburu-buru? *Value for Money* terwujud jika percepatan ini tidak mengorbankan kualitas dan berkontribusi pada peningkatan layanan publik/infrastruktur. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sanger, Gerald William dkk 2023 mengenai "Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode *Value For Money* Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado" menyatakan bahwa guna mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan metode *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik.

Kebijakan ini mendorong *spending better* bukan sekadar penghematan, melainkan realokasi penghematan ke kegiatan yang meningkatkan kualitas pembangunan. Penurunan pagu dan realisasi Belanja Pegawai serta Pengeluaran Lainnya (terutama Hibah dan Bagi Hasil) mengurangi pemborosan dan menjaga postur anggaran sehat. Dengan mengurangi Belanja Transfer dan operasional, dana dialihkan ke sektor produktif. Peningkatan drastis realisasi Belanja Modal (dari 14,26% ke 38,54%) fokus pada investasi infrastruktur untuk dampak jangka panjang. Pergeseran ini mengubah pengeluaran konsumtif menjadi investasi. Penurunan total Anggaran Pendapatan Daerah 2025 (Rp7.557,91 miliar) vs. 2024 (Rp8.342,20 miliar) mencerminkan tantangan kapasitas fiskal dari PAD dan TKDD. Efisiensi wajib untuk meminimalkan defisit, menyelaraskan pengeluaran dengan pendapatan, dan kelola Pembiayaan Daerah (2025: Rp0,00 miliar; 2024: Rp8,61 miliar). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arsyad, (2016) menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan di dalam suatu wilayah. Proses perubahan multidimensional tersebut ditandai oleh proses transformasi struktural.

Meski arah kebijakan benar, implementasi *spending better* menghadapi sejumlah tantangan. Kapasitas Fiskal Terbatas menunjukkan ruang fiskal sempit, sehingga dana Belanja Modal berkurang nominal dan investasi perlu diseleksi ketat. Kapasitas Pelaksanaan Teknis menimbulkan risiko penurunan kualitas proyek jika percepatan realisasi Belanja Modal hingga Mei tidak diimbangi tata kelola pengadaan yang ketat. Kualitas Hasil vs. Realisasi Fisik adalah tantangan utama, memastikan percepatan

menghasilkan manfaat masyarakat, bukan sekadar realisasi tinggi, dengan efisiensi melampaui pengurangan biaya dan percepatan untuk mencapai hasil lebih baik. Kebijakan efisiensi Lampung menunjukkan upaya signifikan untuk *spending better* melalui realokasi ke Belanja Modal. Kesuksesan tergantung pada kualitas dan akuntabilitas percepatan, agar *Value for Money* tercapai via hasil pembangunan lebih baik, bukan sekadar pemindahan angka. *Spending better* 2025 bukan mempercepat penyerapan, melainkan memastikan setiap rupiah menghasilkan nilai tambah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lampung perlu transformasi dari "menghabiskan anggaran" ke "menghasilkan dampak", memerlukan keberanian politik, profesionalisme birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan utama menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di Provinsi Lampung, berdasarkan perbandingan APBD 2024 dan 2025, menunjukkan upaya signifikan untuk mencapai *Value for Money* melalui *spending better*. Hal ini tercermin dalam penurunan pagu Belanja Daerah (dari Rp8.333,59 miliar menjadi Rp7.632,91 miliar), realokasi dari pengeluaran konsumtif seperti Belanja Pegawai dan Pengeluaran Lainnya (termasuk Hibah dan Bagi Hasil) ke Belanja Modal, serta peningkatan drastis realisasi Belanja Modal (dari 14,26% ke 38,54%). Pergeseran ini meningkatkan Efisiensi Alokasi dengan fokus pada investasi infrastruktur untuk dampak jangka panjang, meskipun realisasi Belanja Pegawai turun dan Bansos naik sebagai prioritas kesejahteraan.

Namun, evaluasi Efisiensi dan Efektivitas hasil terbatas oleh data realisasi saja, sehingga sulit memastikan apakah percepatan ini menghasilkan proyek berkualitas atau hanya penyerapan terburu-buru. Tantangan utama meliputi kapasitas fiskal terbatas akibat penurunan pendapatan daerah, risiko penurunan kualitas proyek dari percepatan teknis, dan kesenjangan antara realisasi fisik dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Kesuksesan kebijakan ini bergantung pada penguatan tata kelola pengadaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan nilai tambah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Transformasi dari "menghabiskan anggaran" ke "menghasilkan dampak pembangunan" memerlukan keberanian politik dan profesionalisme birokrasi, agar *Value for Money* benar-benar tercapai melalui hasil pembangunan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Aziz, Adnan Abdul & Eny Kusumawati. 2023. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Social Science Research*, Volume. 4, Nomor 1, Halaman 6987 (<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8734/5970>)
- Azizah N, dkk. (2022). Efisiensi Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan Metode Data *Enviroment Analysis* (DEA). *Bandung Conference Series : Sharia Economic Law*. Vol. 2, No. 1, Hal 129-134. (<https://dx.doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.228>).
- Cellya, dkk. 2024. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. Vol.2, No.2, Hal. 526-531. (<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/996/868>).
- Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Zhu, J. (2011). *Handbook on data envelopment analysis* (2nd ed.). *Springer Science & Business Media*.
- Eka, M. Y. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah: Studi empiris. *NianTanaSikka: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*. Vol.1, No.5. Hal 112-122 (<https://ejournalnipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/176/201>).
- Fauzi Muharram Y, dkk. (2023). Analisis Efisiensi dalam Mengelola Dana Zakat Menggunakan Rasio Keuangan OPZ di BAZNAS Periode 2017-2022 *Analysis of Efficiency in Managing Zakat Funds Using OPZ Dinancial Ratios at BAZNAS for the 2017-2022 Period*. *Maro ; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 6, No. 2, Hal 393-400. (<https://dx.doi.org/10.31949/maro.v6i2.7278>).
- Glynn, J. J., Murphy, M. P., & Irvine, H. (2018). *Public financial management and accountability: A complexity theory approach*. *Routledge*.
- Indrayani & Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (studi kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 2-5. (<https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>).
- JPetra, B. A., dan Sari, Y. P. 2021. "Analisa Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal EKOBISTEK*, Vol. 10, No. 1, Hal. 84-88. (<https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/87/86>)
- Klitgaard, R., & Light, P. C. (2018). *Making Government Work: How to Improve Public Sector Performance*. *Daedalus*, 147(3), 122-134.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.

- Nurrisqi Aina F, dkk. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal of Law, Administration, and Social Science*. Vol. 3, No. 2, Hal 148-163. (<https://dx.doi.org/10.54957/jolas.v3i2.444>)
- Pangkey, Imanuel & Sherly Pinatik. 2015. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.4, Hal. 34. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581>).
- Permatasari, P., Putri, R., & Rahmawati, D. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan pada Provinsi Lampung. *UNIDA Journal: Jurnal Karimahtauhid, Universitas Djuanda . Jurnal Karimah Tauhid*. vol. 4, No.2, Hal. 1610-1611. (<https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/17131/6757>).
- Rahmi Desti S, dkk. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 11, Hal. 292-300. (<https://dx.doi.org/10.35794/emba.v11i1.45645>)
- Sanger, Gerald William dkk. 2023. Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* Vol. 6, No. 2, Hal. 1194 (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/45919/41194>).
- Sinaga M, dkk. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan Nias : mediasi belanja modal. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. Vol. 9, No. 2, Hal 1070-1081. (<https://dx.doi.org/10.29210/020232729>).
- Wahba, dkk. (2023). Analisis Realisasi Dana Alokasi Khusus untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah pada SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Sinar Manajemen*. Vol. 10, No. 2, Hal 194-197. (<https://dx.doi.org/10.56338/jsm.v10i2.3865>).
- Walizi, Hevan. 2024. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*. Volume 2 No.1, Hal. 1707-1714. (<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/251/238>).
- Waney, C., Saerang, D., & Alexander, S. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 3345.

(<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19527.2018>).

Wardani, R., & Silvia, D. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada LPMP Provinsi Lampung. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya (JBAU)*, Universitas Suryadarma. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*. Vol. 6, No. 1, Hal 47-50. (<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/625>).

Yuliani, Sri dkk. 2024. Analisis Hubungan Antara Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dana Dikantor Kppn Langsa Tahun 2022-2024. *Jurnal Gamma-Pi*, Volume 6 Nomor 2, Hal. 66-68. (<https://ejournalunsam.id/index.php/jgp/article/view/11804/5659>).

Yuliyanto, Wakhid dkk. 2022. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, Vol. 6, No. 2, Hal. 457. (<https://www.jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/E-Bis/article/view/989/458>).